

Presiden

Bahwa KH. Abdurrahman Wahid—akrab dengan sapaan Gus Dur atau kini orang menyebut bapak presiden Gus Dur—jadi presiden memang betul. Tetapi harus dimaknai apa kepresidenannya ini? Itu adalah soal interpretasi dan mungkin sebuah harapan—kalau itu tidak berlebihan. Banyak interpretasi yang telah muncul, baik di media massa melalui opini dan pemberitaan maupun omong-omong awam di warung kopi.

Salah satunya yang menurut penulis menarik adalah sebuah analisis, bahwa kini saatnya kalangan santri—yang direpresentasikan melalui Gus Dur—memerintah negeri yang 90 persen penduduknya beragama Islam setelah selama 55 tahun diperintah oleh kalangan abangan yang bekerja sama dengan non-Islam. Analisis seperti ini di samping naif, menurut saya, menyesatkan. Karena hal itu menempatkan Islam dalam kerangka kekuasaan bukan justru kerangka pembelaannya terhadap kerakyatan dan keadilan dalam arti sesungguhnya.

Analisis seperti itu juga akan mudah terjebak pada lobang kesalahan yang sama dengan masa lalu. Yaitu menempatkan Islam sama buruknya dengan pemerintahan yang lalu ketika menggunakan jabatan untuk kepentingan kelompok apalagi keluarga sendiri. Dan kelalaian suatu pemerintahan di bawah Gus Dur dengan pandangan perspektif demikian akan membawa akibatnya sendiri bagi *performance*

Islam di masa depan. Sebuah prinsip harus ditegakkan: alternatif dari suatu yang buruk adalah yang baik bukan sesuatu yang buruk lainnya—kalimat ini pun saya adopsi langsung dari kata-kata Gus Dur sendiri dalam suatu diskusi.

Menurut penulis, kepresidenan Gus Dur harus diangkat atau diperhadapkan dengan tantangan yang jauh lebih tinggi dari sekadar balas dendam dan tantangan sempit semacam itu. Tantangan yang besar itu justru simpel dalam kata-kata, yaitu demokrasi yang tentu saja di dalamnya terkandung keadilan. Kata demokrasi dalam rentang sejarah Indonesia sangat rentan dan selalu menjerumuskan kekuasaan dan rakyat secara bersama-sama pada titik kehancuran. Kita setidaknya mengenal tiga model demokrasi dalam rentang sejarah Indonesia, demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Ketiga-tiganya telah membawa bangsa Indonesia pada jalan buntu dan mungkin bisa disebut anarki. Kenapa terjadi seperti itu? Boleh jadi karena pemberian label demokrasi itu lahir atas pertimbangan menganggap rendah atas rakyatnya sendiri atau atas egoisme kekuasaan semata. Maka kita harus hati-hati lahirnya sebuah label demokrasi dari pemerintahan di bawah Gus Dur ini.

Tidak ada salahnya kalau kita menem-
patkan (harapan) terbangunnya demokrasi di bawah pemerintahan Gus Dur ini dalam

perspektif tantangan global yang, dalam sudut pandang tertentu, ditafsirkan sebagai puncak dari keberhasilan mazhab kapitalisme atau *the end of history*. Dalam perspektif demikian keadilan didefinisikan dari suatu hegemoni dunia tertentu dan menempatkan pihak lain sebagai pinggiran. Sehingga, sebagai pinggiran, semua harus menurut apa saja yang diimplikasikan olehnya. Inilah yang terjadi selama 32 tahun. Kita dihegemoni oleh pengaruh global ini dengan tetap hidup di bawah kungkungan tradisionalisme politik—dalam arti penindasan, pengabaian hak rakyat dan menggelembungnya pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Kita hanya menjadi objek orang luar sembari *me-ngelus-elus* tradisionalisme diri sendiri yang sempit. Begitulah IMF dan Bank Dunia terus mengucurkan dana dengan mengabaikan mengerasnya despotisme di bawah Soeharto.

Maka terbangunnya demokrasi di Indonesia kini justru harus disertai dengan kritisisme terhadap peran—untuk tidak mengatakan campur tangan—lembaga-lembaga dunia itu. Di lain pihak harus pula dipecahkan (*enlightenment*) mengerasnya tradisionalisme yang berlebihan di masa lalu. Dan dalam waktu yang sama tetap menghargai dan menumbuhkan pluralisme di dalam masyarakatnya sendiri. Kita merindukan seorang pemimpin yang bersedia mengembangkan pluralisme dan menghormati perbedaan di dalam masyarakat sendiri tetapi berani berkompetisi dan kalau perlu menantang terhadap kedzaliman di luar. Orang seperti Mahathir Mohamad—PM Malaysia itu—mungkin orang yang berani menantang mainstream

globalisasi yang berwajah tunggal itu. Tetapi, sayangnya, dia tidak siap untuk tetap memelihara pluralisme di dalam masyarakat sendiri. Itu ditandai dengan memenjarakan saingan politiknya, Anwar Ibrahim.

Sebaliknya, Soeharto adalah orang yang paling takluk dengan kemauan mainstream dunia itu, tetapi dalam waktu yang sama dengan kejam menindas rakyatnya sendiri dengan meniadakan pluralisme dan menghancurkan multikultur di dalam masyarakatnya sendiri. Gus Dur—dilihat dari sepak terjang dan *track record*-nya selama ini—adalah orang yang tepat untuk harapan dari kebalikan sifat Soeharto di satu pihak dan melengkapi kekurangan sifat Mahathir di pihak lain.

Gus Dur telah memulai kepresidenannya dengan menjanjikan diberlakukannya—dalam arti sebenarnya bukan kamufase—trias politika. Suatu pemisahan cabang-cabang kekuasaan secara tegas untuk terbangunnya perimbangan dalam masyarakat, dihormatinya hak-hak rakyat dan tegaknya peradilan. Meski ini isyarat yang sangat baik, tetapi belum cukup. Sebab, tanpa tetap tumbuh dan terpeliharanya pluralisme dan kekayaan budaya atau multikultur dalam masyarakat, maka trias politika itu akan menjadi sebatas elitis. Ini juga berkaitan dengan kesiapan kelompok-kelompok masyarakat sendiri dalam menghadapi perbedaan. NU selama ini menjadi salah satu tonggak bagi tumbuhnya masyarakat yang mandiri atau *civil society*. NU dengan seluruh elemennya harus tetap menunjukkan kemandirian dan tidak tergantung pada kepresidenan Gus Dur.

Berkaitan dengan pemeliharaan mul-

tikultur. Kita ingat dalam masa Orde Baru sering terdengar *judgement* dari penguasa tentang “aliran sesat”, “gerakan pengacau liar”, “gerakan pengacau keamanan,” dan “organisasi tanpa berbentuk (OTB)” dan sebagainya. Julukan-julukan tersebut menunjukkan betapa tidak siapnya penguasa mengelola perbedaan dan melindungi pluralisme. Kita berharap dengan pemerintahan baru kini, multikultur dalam masyarakat kita benar-benar menjadi

kekayaan yang harus dipelihara dan dikembangkan menjadi kekuatan bangsa. Dan dalam dataran politik, cara-cara pemenjaraan, pembungkaman dan pembatasan ruang gerak—politik maupun ekonomi—terhadap lawan politik harus diakhiri diganti dengan perundingan, negosiasi dan pencarian titik temu. Dengan kekuatan multikultur itulah kita menghadapi gelombang globalisasi dan kedzaliman global. ❖(Ahmad Suaedy)